

Workshop Perpajakan PPh 21 dan PPh Badan di SMK Kadiri-Kras

Deasy Ervina¹, Dwi Ari Pertiwi², Rachma Agustina³, Meta Ardiana⁴

¹²³⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Iebuireng Jombang
E-mail : deasyervina12@gmail.com

ABSTRAK

Ilmu perpajakan dewasa ini sangat dibutuhkan setiap individu yang memiliki usaha, apalagi segala jenis usaha saat ini selalu membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam mengurus segala perijinan usaha. Setelah memiliki NPWP, seorang Wajib Pajak harus melakukan penghitungan dan pelaporan pajak, baik setiap bulan ataupun setiap tahun. Oleh karena itu sebagai bekal, siswa SMK harus menguasai ilmu perpajakan sebelum terjun ke dunia usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para siswa SMK mampu melakukan pelaporan pajak tahunan baik badan ataupun pribadi. Kegiatan PKM ini dikemas dalam bentuk *workshop*, sehingga peserta mendapat materi dan praktik secara langsung. Kegiatan dihadiri 22 siswa. Interaksi antara pemateri dan peserta mampu menjembatani permasalahan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sehingga mampu mengenali keadaan serta kebutuhan peserta dan memberi solusi yang terbaik.

Kata kunci : NPWP, wajib pajak

ABSTRACT

Knowledge of taxation nowadays is very much needed by every individual who owns a business, especially now that all types of businesses always need a Taxpayer Identification Number (NPWP) in managing all business permits. After having an NPWP, a Taxpayer must carry out tax calculations and reports, either monthly or annually. Therefore, as a provision, SMK students must master the science of taxation before plunging into the business world. This activity is carried out with the aim that SMK students are able to do annual tax reporting both corporate and personal. This PKM activity is packaged in the form of a workshop, so that participants receive material and practice directly. The activity was attended by 22 students. The interaction between presenters and participants is able to bridge problems in filling out and reporting the Annual Tax Return so that they are able to recognize the circumstances and needs of participants and provide the best solution.

Keywords : NPWP, individual tax payer

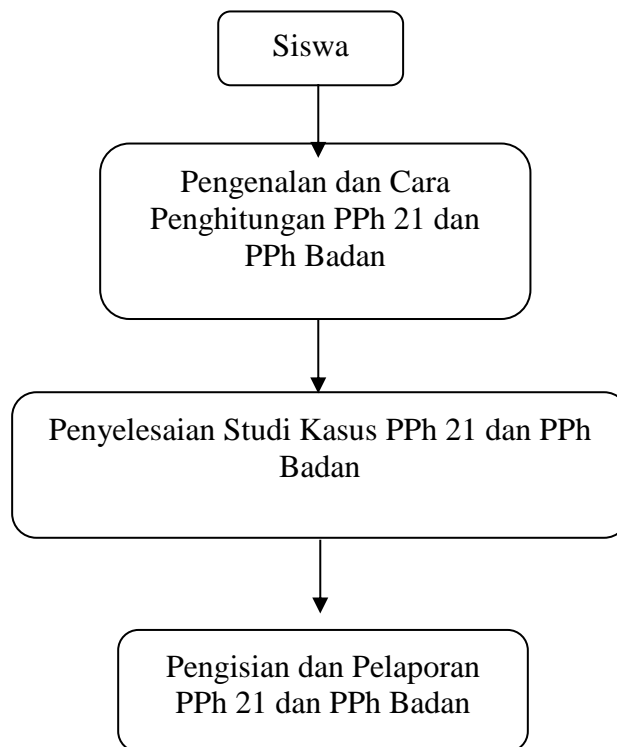
PENDAHULUAN

Ilmu perpajakan dewasa ini sangat dibutuhkan setiap individu yang memiliki usaha, apalagi segala jenis usaha saat ini selalu membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam mengurus segala perijinan usaha. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018).

Setelah memiliki NPWP, seorang Wajib Pajak harus melakukan penghitungan dan pelaporan pajak, baik setiap bulan ataupun setiap tahun. Oleh karena itu sebagai bekal, siswa SMK harus menguasai ilmu perpajakan sebelum terjun ke dunia usaha. SMKS Kadiri Kras adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK yang berlokasi di Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Adanya mata pelajaran perpajakan di SMKS ini, membuat animo mahasiswa terutama kelas XII, sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini. Apalagi masih jarang sekali diadakannya kegiatan edukasi perpajakan di sekolah ini. Mengingat pentingnya *workshop* perpajakan ini, SMK Kadiri-Kras meminta Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dimana kegiatan ini bertujuan agar para siswa SMK mampu melakukan penghitungan, pengisian dan pelaporan pajak tahunan baik badan ataupun pribadi sehingga diharapkan siswa SMK mempunyai bekal ilmu perpajakan sebelum terjun ke dunia usaha.

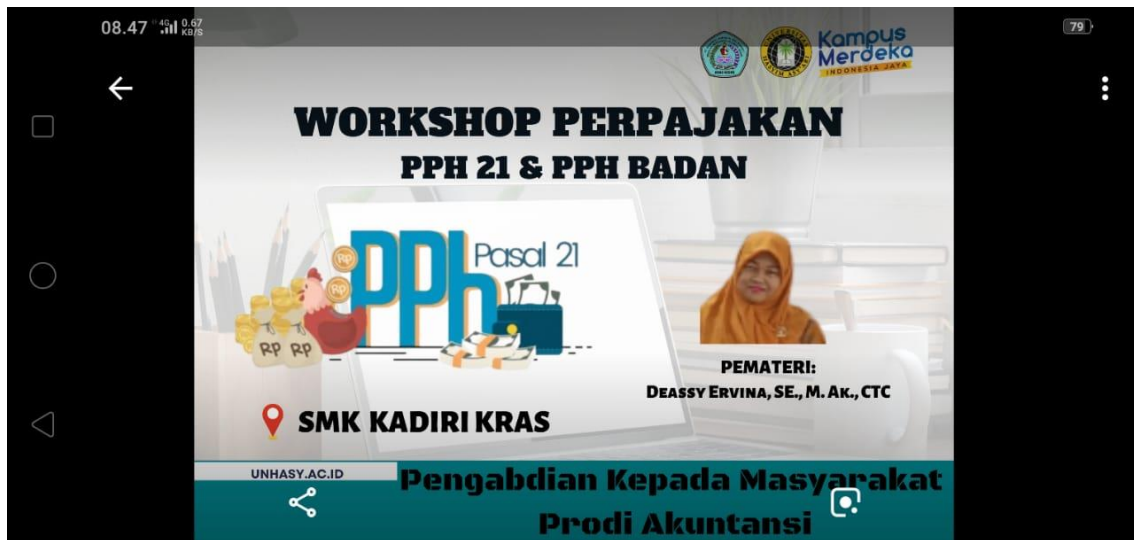
METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PKM tampak pada skema pelaksanaan dan alur pikir di bawah ini:



Gambar 1. Skema Pelaksanaan *Workshop* PPh 21 dan PPh Badan

Metode Pelaksanaan sesuai dengan Gbr 1 melalui *Workshop* Pelatihan yang dimulai dengan pengenalan dan cara penghitungan melalui penyelesaian studi kasus dan diakhiri dengan pengisian dan pelaporan PPh 21 dan PPh Badan



Gambar 1. Flyer Workshop Perpajakan



Gambar 2 Pemaparan tentang PPh Badan



Gambar 3 Penjelasan, pengisian dan pelaporan SPT Masa PPh 21



Gambar 4 Foto bersama Guru dan Siswi SMKS Kadiri Krus

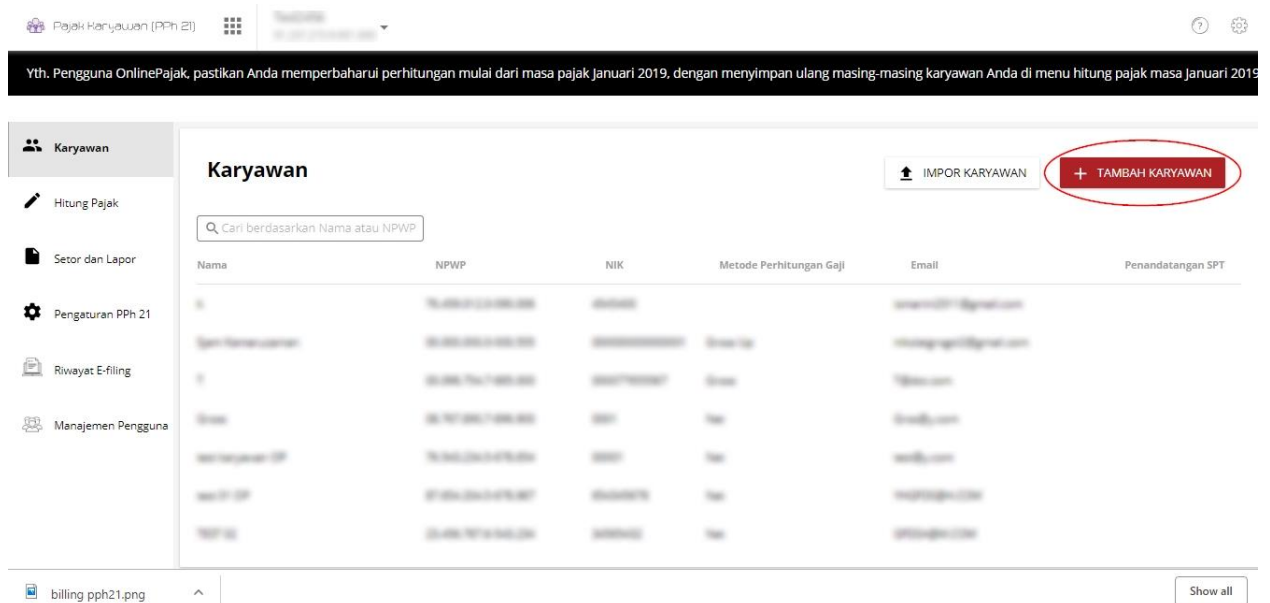
HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat pemberitahuan PPh 21 (SPT PPh 21) adalah surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak (Resmi, 2017). Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa denda telat lapor PPh Pasal 21 sebesar Rp100.000 dan denda bunga telat bayar sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak terutang.

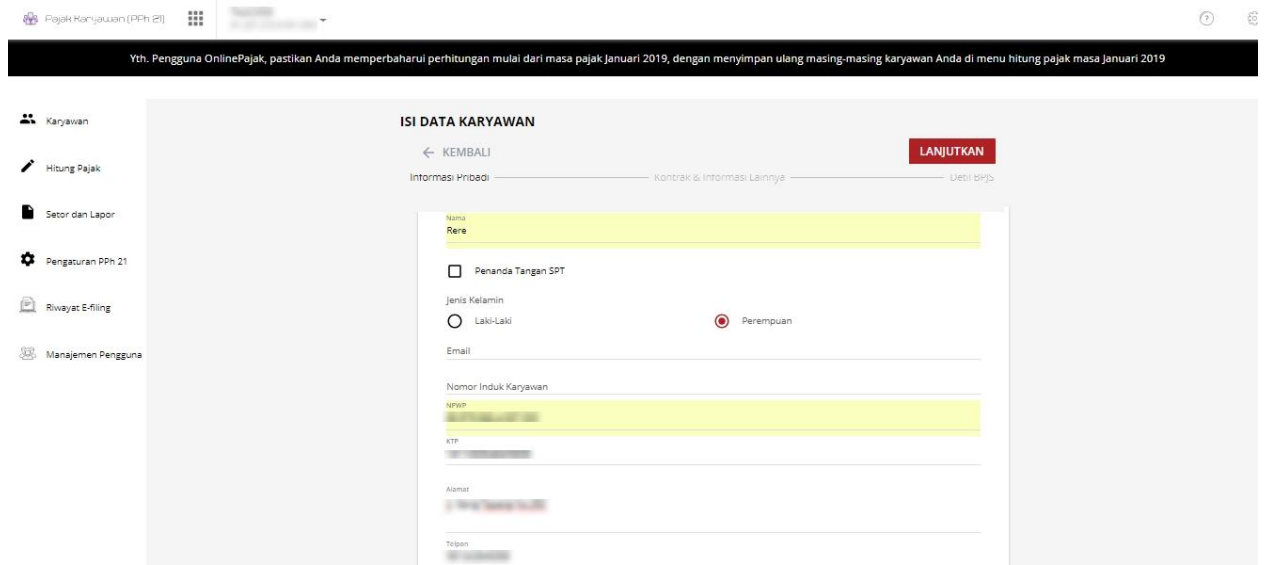
Cara lapor SPT Masa PPh pasal 21 via *online* adalah sebagai berikut :

1. Pastikan telah memiliki EFIN (nomor identitas digital)
2. Masuk ke situs dijonline.pajak.go.id.
3. Masukkan NIK/NPWP, password, dan kode keamanan.
4. Klik login.
5. Klik pilihan '**Lapor**' dan pilih layanan 'E-Filing'
6. Klik '**Buat SPT**'

Bagi pengguna baru, untuk dapat menghitung PPh 21 secara otomatis, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftar. Setelah login, selanjutnya pilih menu PPh 21 dan klik tombol “+ **Tambah Karyawan**” untuk membuat atau menambahkan data karyawan baru.

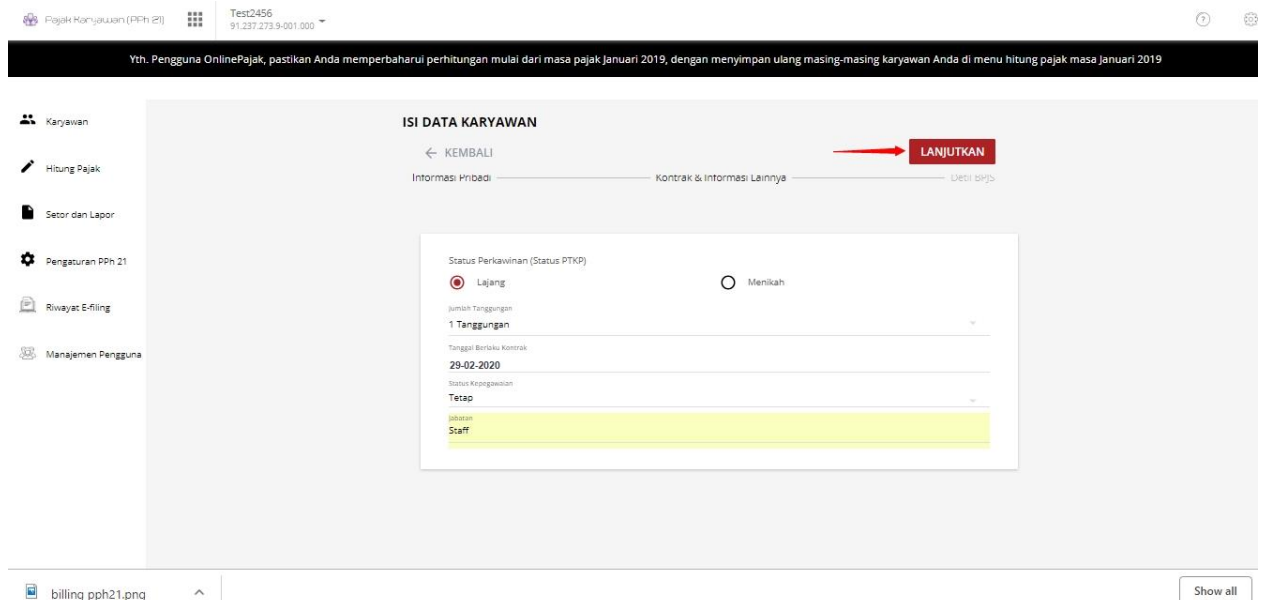


– Kemudian, masukan data pribadi karyawan. Setelah selesai, klik “**Lanjutkan**”.

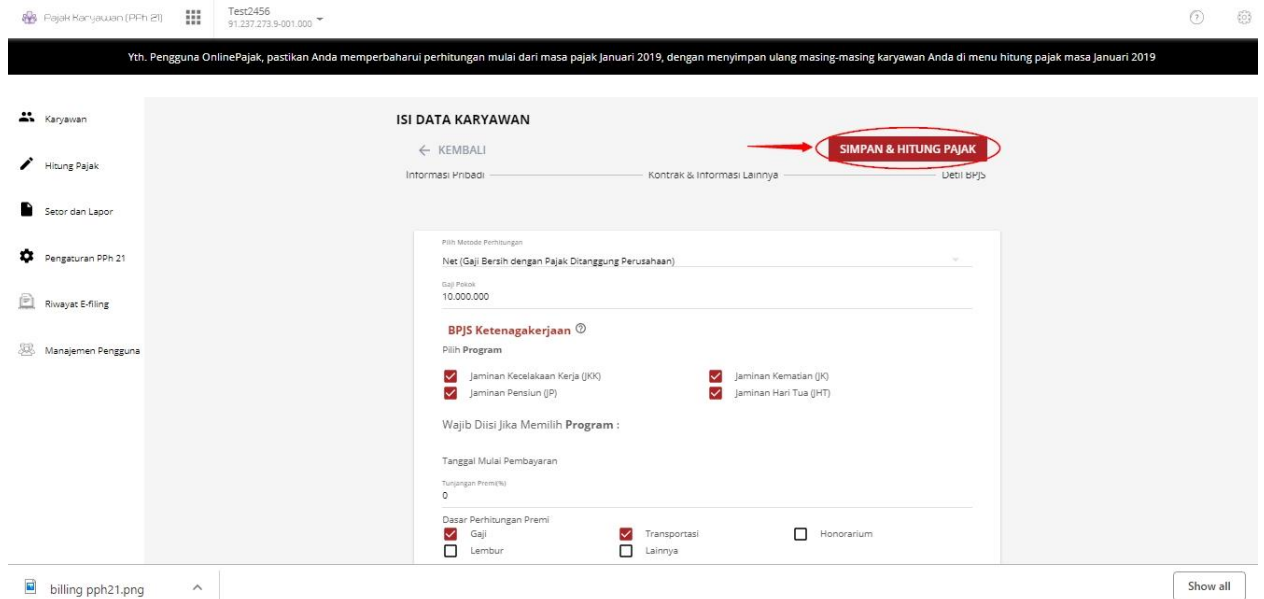


– Setelah itu, Masukkan detail kontrak kepegawaian, status perkawinan dan tanggungan agar sistem dapat menghitung dan menentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) karyawan. Penting untuk diingat, karyawan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, serta tak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan suaminya, cukup mengisi ‘status pernikahan lajang’. Sebab, pajaknya sduah ditanggung oleh suami.

– Setelah semua detail diinput, silakan klik “**Lanjutkan**”.

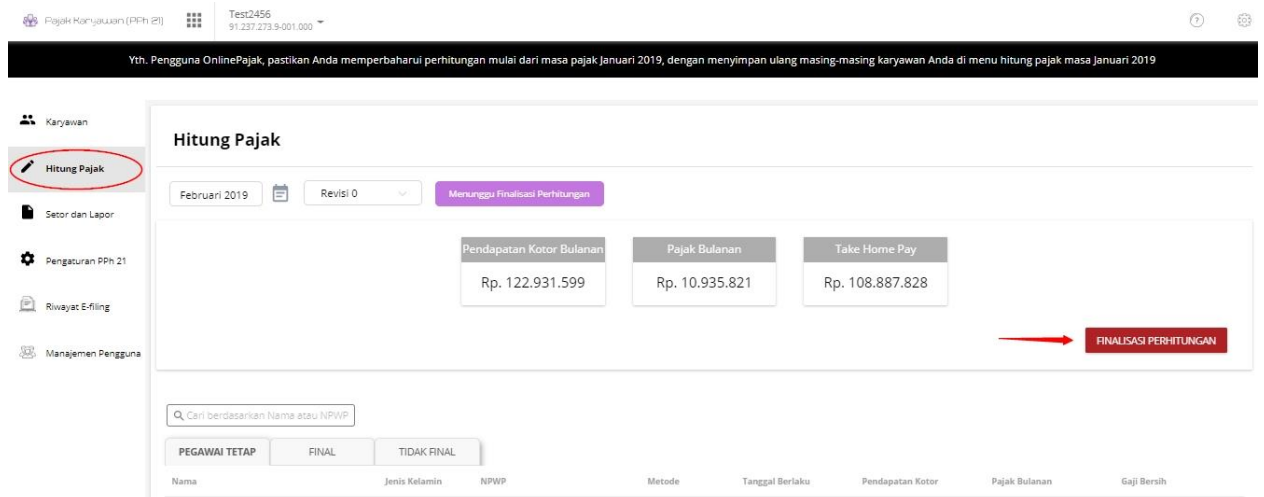


– Kemudian, pilih metode perhitungan gaji (*gross*, *gross up*, atau *net*), program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tentukan juga tanggal mulai pembayaran premi, jumlah persentase premi yang ditanggung oleh perusahaan, dan dasar perhitungan persentase BPJS (apakah hanya dari gaji pokok, atau berikut tunjangan-tunjangan lainnya).

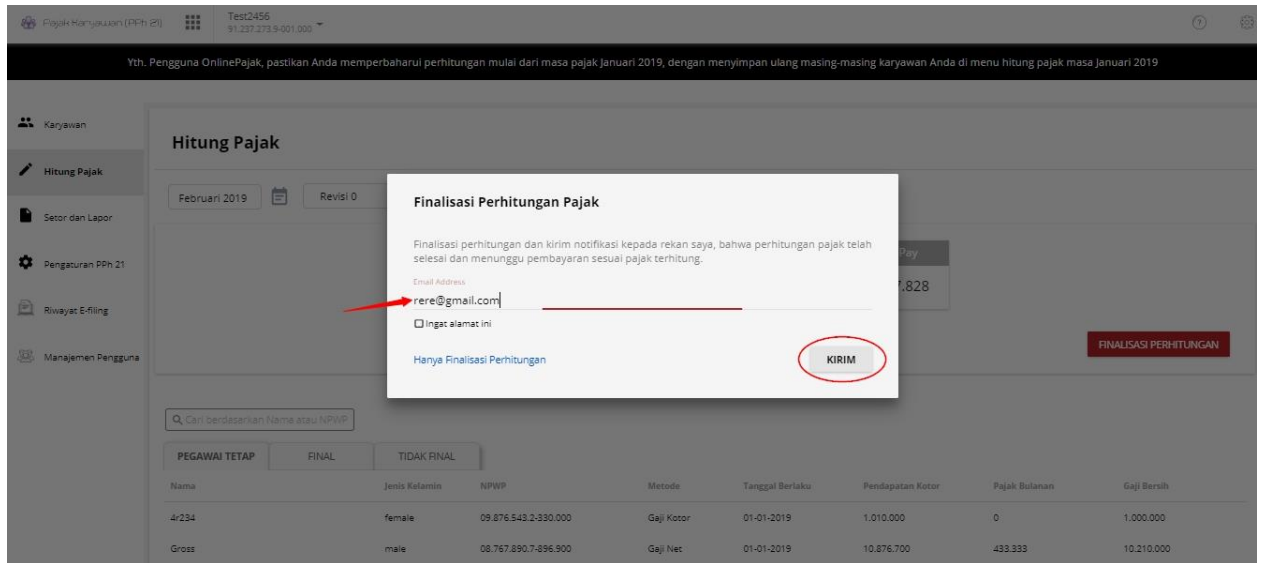


– Selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa data karyawan baru telah berhasil dimasukkan. Aplikasi OnlinePajak kemudian akan menghitung otomatis PPh 21 berdasarkan data yang dimasukkan. Setelah penghitungan otomatis dilakukan, klik **“Simpan”**. Ulangi langkah di atas untuk menghitung otomatis PPh 21 karyawan-karyawan lainnya.

– Bila PPh 21 semua karyawan telah dihitung dan tidak ada lagi yang akan diubah, klik **“Finalisasi Perhitungan”**.



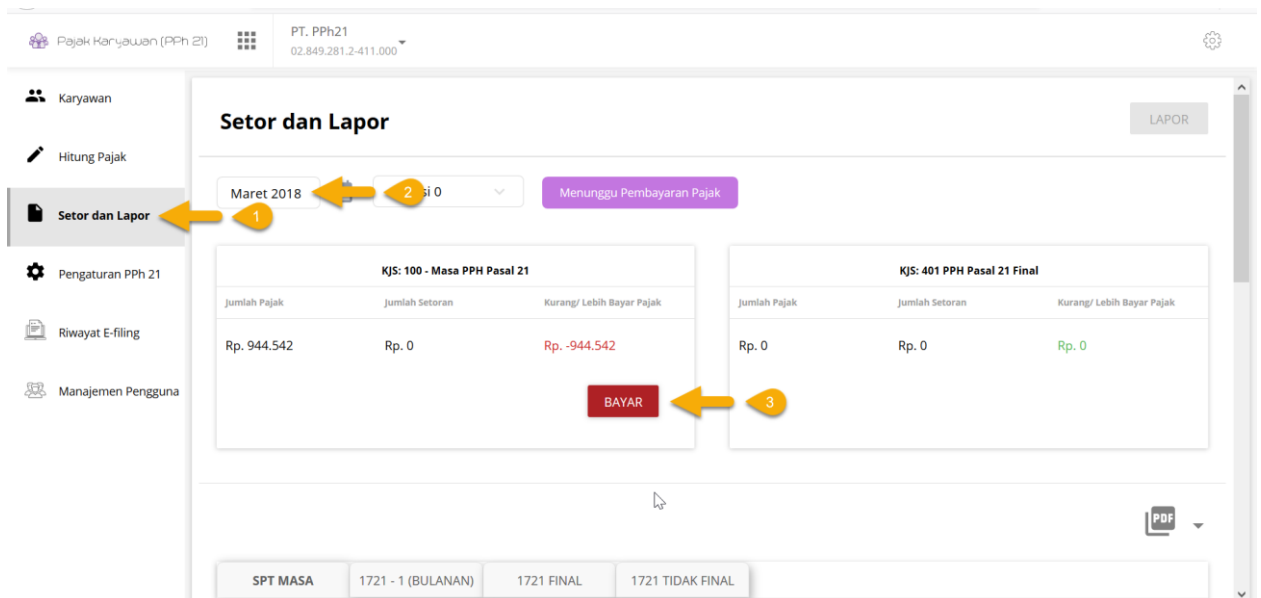
– Selanjutnya, wajib pajak dapat mengirim hasilnya kepada akuntan dengan memasukkan emailnya dan klik tombol **“Kirim”**.



Setelah memperoleh hasil perhitungan, langkah selanjutnya adalah membuat ID Billing dan menyetor PPh 21 terutang. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

– Klik menu “PPh 21” atau menu “Setor dan Laporan” > klik “Bayar” > periksa kembali informasi yang dimasukkan > klik “Generate e-Billing” > klik “Simpan”.

Selanjutnya, ID billing akan terisi otomatis di *form* setoran tersebut. Untuk melakukan pembayaran, pastikan saldo pada akun virtual (PajakPay) tersedia. Jika saldo kurang, lakukan top-up terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan pembayaran 1 klik di fitur “PajakPay”.



– Konfirmasikan pembuatan ID Billing dan penyetoran pajak dengan klik “Bayar”.

– Setelah bayar, Anda akan langsung menerima NTPN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 09/PMK.03/2018, SPT Tahunan Badan adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan denda telat melaporkan SPT senilai Rp1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan.

Cara lapor SPT Masa PPh Badan via *online* adalah sebagai berikut :

1. Daftar Akun Klikpajak.
2. Verifikasi Email Perusahaan.
3. Login ke akun Klikpajak Anda.
4. Melengkapi Profil Penandatanganan **SPT**
5. Mengisi Formulir **SPT Tahunan Badan 1771**
6. Mengisi **Laporan** Keuangan
7. Mengisi Lampiran Khusus
8. Mengisi Lampiran-Lampiran **SPT Tahunan Badan**

Langkah-langkah berikut dalam melakukan proses pelaporan pajak dengan cara membuat SPT Tahunan Badan adalah sebagai berikut .:

1. Mengisi Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan.
2. Mengisi Lampiran Khusus. Berikut lampiran khusus yang harus diisi dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak badan:
 - Daftar cabang utama perusahaan
Lampiran daftar cabang utama perusahaan merupakan lampiran khusus 5A/5B, yang harus disampaikan oleh WP Badan yang memiliki kantor cabang atau tempat usaha di luar kantor pusat.
 - Daftar penghitungan penyusutan/amortisasi
 - Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa
 - Daftar fasilitas penanaman modal
 - Perhitungan kompensasi kerugian fiskal
 - Kredit pajak luar negeri
3. Mengisi Lampiran Utama

Setidaknya ada enam lampiran utama formulir SPT Badan 1771 ini yakni formulir SPT 17771-I hingga Formulir 1771-VI yang harus diisi.

DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Hasil yang telah dicapai dengan adanya pengabdian yang telah dilakukan yaitu siswa mampu melakukan penghitungan PPh 21 dan PPh Badan dari studi kasus yang disajikan. Selain itu, siswa mampu melakukan pengisian SPT PPh 21 dan PPh Badan secara *online* melalui aplikasi *e-filling*, yang belum didapatkan di bangku sekolah

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini dikemas dalam bentuk *workshop*, sehingga peserta mendapat materi dan praktik secara langsung. Tantangan yang dihadapi yaitu para siswa membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam pengerjaan studi kasus dan dalam pengisian aplikasi PPh 21 dan PPh Badan ini. Kegiatan ini mampu menjawab persoalan yang dihadapi para siswa dalam pengisian SPT PPh 21 dan PPh Badan, karena selama ini para siswa hanya mendapatkan secara teori saja dalam penghitungan PPh 21 dan PPh Badan, tanpa tau bagaimana mengaplikasikannya dalam dunia kerja. Hal ini tentu saja menambah wawasan para siswa, sehingga mampu mencapai target kegiatan.

Implikasi dari kegiatan ini, siswa telah mampu menghitung dan menginput data dalam aplikasi SPT PPh 21 dan SPT Tahunan Badan secara online melalui *e-filling*. *Workshop* pengisian PPh 21 dan PPh Badan pada siswa SMK ini bertujuan memberikan edukasi di bidang perpajakan, diharapkan para siswa mampu mengaplikasikannya dengan baik dan benar, sehingga ketika mereka telah lulus sekolah sudah bisa menjadi tenaga siap pakai dan handal dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan. *Workshop* ini membutuhkan waktu yang cukup banyak agar siswa menjadi terampil dan cekatan, apalagi dengan peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, apabila mengadakan *workshop* perpajakan hendaknya dilakukan dalam beberapa hari, supaya siswa lebih mampu dan terampil dalam mengaplikasikannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada SMK Kadiri Kras dan pihak-pihak yang berperan dalam membantu kelancaran kegiatan PKM ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN*. Andi Yogyakarta.
- Pusat, P. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. In *Undang-Undang Resmi*, S. (2017). *Perpajakan - Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- RI, M. K. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018*.
- RI, P. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018*